

WTO TRIPS Waiver

Ditulis oleh:

Annie Zhu

Mahasiswa magang Program
Praktikum Profesional Hukum ACICIS
di IGJ periode Januari-Februari 2021,
saat ini sedang menempuh
pendidikan sarjana hukum dan
seni jurusan Hukum
di University of New South Wales.



Proposal TRIPS Waiver yang diusulkan di WTO (Organisasi Perdagangan Dunia) sangat penting untuk memastikan akses pada obat-obatan, vaksin, dan peralatan medis lainnya terkait Covid-19 yang aman dan terjangkau ke semua negara-negara anggota.

Apa itu TRIPS Waiver?

Proposal TRIPS Waiver diusulkan oleh India dan Afrika Selatan pada 2 Oktober 2020, bertujuan mendesak negara-negara WTO untuk membebaskan (mengabaikan) kewajiban melindungi hak kekayaan intelektual (HKI) terkait pencegahan, penanganan dan pengobatan Covid-19 secara sementara selama pandemi berlangsung.

Mengapa TRIPS Waiver diusulkan?

TRIPS Waiver diusulkan untuk memberikan fleksibilitas kepada negara dalam memilih apakah akan memberlakukan perlindungan HKI (hak paten, desain industry, hak cipta, dan rahasia dagang) atau tidak terkait dengan penanganan Covid19. Perlu diketahui, berbagai obat, peralatan medis dan vaksin yang digunakan dalam penanganan Covid-19 sebagian besar dilindungi oleh HKI. Dan siapapun tidak diperbolehkan untuk memproduksi, menjual, mengimpor dan mengekspor tanpa izin pemegang hak.

Bagaimana cara kerjanya?

Jika negara-negara anggota sepakat dengan proposal TRIPS waiver, maka produksi, impor dan atau ekspor obat, peralatan medis dan vaksin terkait dengan Covid19 bisa dilakukan di banyak negara anggota. Sehingga ketersediaan, keterjangkauan dan akses atas obat, peralatan medis dan vaksin bisa diperbanyak dengan cepat.

Apa argumen Negara Pendukung dan Negara Penentang

Para Pendukung

Berpandangan bahwa situasi saat ini merupakan "keadaan luar biasa" yang disebabkan oleh pandemi dan berpendapat bahwa perlindungan HKI "menghalangi atau berpotensi menghalangi penyediaan produk-produk medis yang terjangkau secara tepat waktu"

X

Para Penentang

Berpendapat bahwa perjanjian TRIPS telah memberikan fleksibilitas yang memungkinkan negara-negara untuk mengeluarkan lisensi untuk memproduksi, mengekspor atau mengimpor yang diperlukan dalam penanganan Covid-19.



“Proposal TRIPS waiver akan dibahas kembali dalam Rapat dewan TRIPS yang dijadwalkan pada 10 Maret 2021”

Pada 10 Desember 2020, proposal TRIPS Waiver mendapatkan dukungan lebih banyak dari negara-negara berkembang termasuk Bolivia, Eswatini, Kenya, Mongolia, Pakistan dan Venezuela. Meskipun masih belum cukup untuk mencapai 3/4 mayoritas yang dibutuhkan di WTO untuk meloloskan rekomendasi tersebut.

Negara-negara kaya yang mewakili 13% populasi dunia telah membeli hampir 51% dari pasokan vaksin global, memperburuk ketidaksetaraan terhadap akses vaksinasi yang aman dan terjangkau.



Proposal TRIPS waiver juga mendapat dukungan dari berbagai pihak termasuk Direktur Jenderal WHO, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus; Lembaga PBB UNAIDS; South Center; senator dari Filipina, Pakistan, Kolombia, dan Malaysia; lembaga internasional UNITAID; MSF (Dokter tanpa batas); lebih dari 400 organisasi masyarakat sipil di seluruh dunia, 900 ribu orang yang memberikan dukungan pribadi, dan lain lain.



Negara-negara kaya, termasuk Australia, Kanada dan Jepang, telah menolak seruan untuk mendukung proposal tersebut, dengan menyatakan mereka membutuhkan bukti lebih lanjut bahwa fleksibilitas TRIPS tidak mencukupi.